



EVALUASI PROGRAM BANTUAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI: STUDI KASUS KARTU PRAKERJA DI MAKASSAR

Evaluation of Economic Assistance Programs during the Pandemic: A Case Study of Pre-employment Card in Makassar

Moetia Larasati Fasri¹, Muhammad Tang Abdullah², Andi Rahmat Hidayat³,
Amril Hans⁴

¹Program Studi Administrasi
Publik, Universitas Hasanuddin;
Email: larasatimoe@gmail.com

²Departemen Ilmu Administrasi,
Universitas Hasanuddin;
Email:
tang.abdullah@unhas.ac.id

³Departemen Ilmu Administrasi,
Universitas Hasanuddin;
Email:
andirahmatfisip@gmail.com

⁴Departemen Ilmu Administrasi,
Universitas Hasanuddin;
Email: amril.hans@unhas.ac.id

Keywords: *Evaluation;
Program Effectiveness; Pre-
employment Card; Workforce;
Pandemic*

Kata kunci: Evaluasi; Efektifitas
Program; Kartu Prakerja; Tenaga
Kerja; Pandemi

Abstract

This study aims to describe and explain the Effective is the Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) Program for Workers in the COVID-19 Pandemic Period in Makassar City. The research method used in this study is a qualitative research method and the data collection technique in this study uses interviews and documentation. The results showed that the success of Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) Program in Makassar City was quite effective, but there are still some weaknesses in its implementation considering: (1) The accuracy of targeting the beneficiaries of Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) Program is still inaccurate due to the absence of a national worker database covering the entire workforce; (2) The real changes experienced by the beneficiaries of Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) Program are still not felt because there is no long-term guarantee for the recipients; (3) Public understanding of the Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) Program can be said to be very good; (4) The timing of the disbursement of Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) Program incentives to beneficiaries was very good because it was disbursed earlier than the predetermined schedule; (5) The objectives of Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) Program have been achieved as seen from the number of beneficiaries who have benefited from the training and incentives received.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Efektivitas Program Kartu Prakerja bagi Tenaga Kerja di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif dan adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Kartu Prakerja di Kota Makassar sudah cukup efektif, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya melihat: (1) Ketepatan sasaran penerima manfaat program Kartu Prakerja masih kurang tepat dikarenakan belum adanya basis data pekerja nasional yang mencakup seluruh angkatan kerja; (2) Perubahan nyata yang dialami oleh penerima manfaat program Kartu Prakerja masih kurang dirasakan karena tidak ada jaminan jangka panjang untuk para penerima; (3) Pemahaman masyarakat mengenai program Kartu Prakerja dapat dikatakan sangat baik; (4) Ketepatan waktu pencairan insentif program Kartu Prakerja kepada penerima manfaat sudah sangat baik karena cair lebih dulu dari jadwal yang sudah ditentukan; (5) Tujuan dari Program Kartu Prakerja telah tercapai dilihat dari banyaknya penerima manfaat yang telah merasakan manfaat dari pelatihan dan insentif yang diterima

PENDAHULUAN

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi virus korona sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Penetapan ini dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres tersebut Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dimana Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebelumnya World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu.

Pemerintah menggelontorkan dana besar untuk menangani penyebaran wabah COVID-19, memberikan bantuan perlindungan sosial, dan mitigasi ekonomi kepada masyarakat yang terpapar. Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp 677 triliun, dan terakhir dinaikkan lagi menjadi Rp 695,2 triliun. Dana tersebut diberikan untuk seluruh sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19. Pada 19 Juni 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan

bahwa dana penanganan penyebaran virus COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa melonjak hingga Rp 905,1 triliun. Jumlah tersebut naik lebih dari 30 persen dari sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 695,2 triliun. (Purwanto, 2020).

SMERU Research Institute (2020), lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, merilis catatan kebijakan mereka pada Agustus 2020 yang berjudul "Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan". Tim riset SMERU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi yang ditimbulkan oleh krisis ini pada sektor ketenagakerjaan, yaitu peningkatan angka pengangguran dan berubahnya lanskap pasar tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, akibat pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Badan Pusat Statistik (2020) mencatat dampak pandemi COVID-19 terhadap bertambahnya pengangguran dan aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terdapat 801.276 orang yang terdampak COVID-19 atau 11,88 persen. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 61.148 orang, atau sekitar 29,4% dari total jumlah pengangguran. Bukan Angkatan Kerja karena COVID-19 sebanyak 21.289 orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 61.309 orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 657.530 orang.

Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Pada Agustus 2018 sebanyak 11,45 persen, lalu mengalami penurunan menjadi 9,83 persen pada Agustus 2019 dan kembali mengalami penambahan menjadi 15,92 persen pada Agustus 2020. Penambahan yang cukup signifikan ini merupakan dampak dari COVID-19. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Kepala BPS Sulsel, Yos Rusdiansyah yang dikutip dari Fajar.co.id (2020), "Banyak faktor pengangguran meningkat, salah satunya karena wabah pandemi," (Kamis, 3 Desember 2020).

Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan terobosan melalui kebijakan baru berupa Program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini ditujukan untuk semua warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan lulusan SMA/SMK/SMP/ perguruan tinggi ataupun mereka yang menganggur karena PHK dan berusia 18 tahun ke atas serta tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Dalam rangka merespon dampak dari pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan di prioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya dengan skema semi bantuan sosial untuk mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Hal itu sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial. Penerbitan Kartu Prakerja juga diharapkan dapat

memberikan peluang bagi penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tahun 2020, Sejak peluncuran Kartu Prakerja gelombang 1 lalu, program ini mencapai jumlah pendaftar sebanyak 43,8 juta orang. Bahkan, Prakerja jadi program pemerintah yang masuk top 10 penelusuran terpopuler Google Indonesia pada 2020. Dari sekian pendaftar, terdapat 5,5 juta penerima program Kartu Prakerja dari gelombang 1 sampai 11.

SMERU Research Institute (2020) menemukan bahwa penerima manfaat program Kartu Prakerja yang sesuai dengan sasaran pelatihan yang juga terdampak pandemi COVID-19 sehingga mereka juga sesuai dengan sasaran bantuan sosial (Bansos). Namun, tim riset SMERU juga menemukan penerima manfaat program Kartu Prakerja yang tidak tepat untuk mengikuti pelatihan tetapi sangat membutuhkan bansos karena sangat terdampak pandemi COVID-19. Selain itu tim riset SMERU juga menemukan beberapa penerima manfaat yang tidak sesuai dengan sasaran pelatihan program ini tidak bersedia membayar biaya pelatihan tambahan dan juga tidak mendapatkan manfaat dari pelatihan yang mereka ikuti, mereka menyelesaikan pelatihan secara terburu-buru agar tidak menghabiskan kuota internet.

Selain itu, dilansir dari tirto.id (2020), survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020 menyingkap tabir Kartu Prakerja. Sebanyak 66,47 persen penerima program ini statusnya masih 'bekerja', sementara penerima dengan status 'pengangguran' hanya 22,24 persen dan sisanya, 11,29 persen, diisi Bukan Angkatan Kerja.

Dengan demikian, hal tersebut menjadi bahan penulis untuk melihat sejauh mana efektivitas program Kartu Prakerja ini. Dalam hal ini penulis tidak hanya memfokuskan pada penerima manfaat yang statusnya terdampak COVID-19, tetapi juga pada penerima manfaat yang statusnya masih mencari kerja, serta pekerja/buruh yang masih membutuhkan peningkatan kompetensi, mengingat pentingnya program ini dalam menekan angka pengangguran di Indonesia khususnya Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Makassar selama pandemi COVID-19..

Kajian Pustaka

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, disebut efektif apabila tujuan dan sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kamus *The New Grolier Webster International Dictionary of The English Language* (1974) dalam Satries (2011) memberikan pengertian efektivitas sebagai kata benda dari kata *effective* yang artinya *producing the intended or expected result; adapted for a desired end*, Artinya adalah sejauh mana hasil dan tujuan sudah dicapai. Drucker (1964) dalam

Satries (2011) mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).

Menurut Steers (1985), efektivitas adalah sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya, efektivitas paling mudah dipakai bila dipandang dari sudut pencapaian tujuan optimum yakni efektivitas organisasi dapat dipandang sebagai batas kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Steers juga mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu: optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem, dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Selain itu efektivitas menurut Steers sebaiknya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan bukan sebagai keadaan akhir.

Untuk mengukur tentang efektif atau tidak dari segi pencapaian sasaran dalam suatu kegiatan dalam organisasi, hal ini berpedoman pada indikator ataupun kriteria pencapaian sasaran atau tujuan yang dinyatakan Gibson, dkk (1994), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisa dan perumusan kebijakan.
4. Perencanaan yang mantap.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasaran.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Program menurut Manullang (2007) adalah sebagai gabungan dari politik, prosedur, dan anggaran yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu tindakan untuk waktu yang akan datang.

Menurut Pariata Westra dkk. (1989) mengatakan bahwa Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Lebih lanjut, Terry (tahun?) dalam (Thalia, 2020) menyatakan program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran.

Menurut Satries (2011), program kerja akan dibuat oleh suatu organisasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi yang bersangkutan, jenis-jenis program kerja dapat dibedakan antara lain:

1. Menurut rentang waktu perencanaan

- a. Program kerja untuk satu periode kepengurusan. Jenis program kerja ini biasanya dibuat oleh organisasi untuk satu periode kepengurusan, sehingga kegiatan rapat kerja (raker) organisasi hanya dilakukan sekali dalam satu periode kepengurusan dan untuk tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi dan koordinasi dari program kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Program kerja untuk waktu tertentu. Jenis program kerja seperti ini disusun untuk suatu jangka waktu tertentu biasanya triwulan, caturwulan, semester dan lain lain. Dalam pembuatan metode program kerja seperti ini maka akan ditemui bahwa suatu organisasi akan mengadakan rapat kerja (raker) organisasi lebih dari sekali dalam satu periode kepengurusan.
2. Menurut sifat program kerja
- a. Program kerja yang bersifat terus menerus (*continue*). Program kerja seperti ini akan dilakukan secara terus menerus (tidak hanya sekali) oleh suatu organisasi, kesulitan pengimplementasian program kerja umumnya akan dihadapi saat pertama kali melaksanakan jenis program kerja ini.
 - b. Program kerja yang bersifat insidental. Program kerja seperti ini umumnya hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu oleh suatu organisasi biasanya mengambil momentum-momentum waktu yang penting.
 - c. Program kerja yang bersifat tentatif. Program kerja ini sifatnya akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang akan datang. Alasan dibuatnya program kerja jenis ini adalah karena kurang terjaminnya faktor-faktor pendukung ketika diadakannya perencanaan mengenai suatu program kerja lain.
3. Menurut targetan organisasi
- a. Program kerja jangka panjang. Program kerja jangka panjang harus sesuai dengan cita-cita/tujuan pembentukan organisasi, serta visi dan misi dari organisasi. Program kerja model ini dibuat karena kemungkinan untuk merealisasikan dalam waktu yang pendek tidak memungkinkan.
 - b. Program kerja jangka pendek. Program kerja jangka pendek adalah program kerja organisasi dalam suatu periode tertentu, yang jangka waktunya berkisar antara 1-3 tahun, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi pada masa tersebut. Dalam hubungannya dengan program kerja jangka panjang, dalam program kerja jangka pendek ini, dibuat bagian-bagian program kerja yang dapat direalisasikan dalam jangka waktu dekat.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas

program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binalattas Depnaker, 1983, dalam Rakhmat 2018).

Menurut Kettner dkk (2008) terdapat kriteria penilaian apakah suatu program efektif atau tidak, yaitu:

1. *Effort* (Upaya), data memberikan umpan balik pada sejumlah produk dan pelayanan yang disediakan, kualitas jumlah produk dan pelayanan yang disediakan, dan tercapainya penyelesaian jumlah pelayanan.
2. *Cost – Efficiency*, data memberikan umpan balik mengenai biaya penyediaan produk program dan layanan, termasuk output menengah, kualitas output, dan output akhir.
3. *Result*, data memberikan umpan balik tentang sejauh mana suatu program dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan (*outcome*) baik hasil sementara dan hasil akhir. Result data dapat dipantau selama pelaksanaan untuk membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan hasil yang direncanakan.
4. *Cost – Effectiveness* data memberikan umpan balik pada biaya mencapai hasil program (*outcome*), baik hasil sementara dan hasil akhir. *Cost Effectiveness* data biasanya hanya tersedia pada akhir tahun program (evaluasi program) dan digunakan untuk mendokumentasikan biaya mencapai hasil (*outcome*) untuk keperluan perencanaan kebijakan dan untuk tujuan pelaporan pengukuran kinerja.
5. *Impact* (Dampak), data memberikan umpan balik pada pertanyaan penilaian yang paling sulit dari semua yaitu: apa yang terjadi dengan klien sebagai hasil dari partisipasi dalam program dan apa yang tidak akan terjadi jika tidak adanya program? Untuk menjawab pertanyaan ini, data dampak biasanya dihasilkan dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial, termasuk penciptaan kelompok kontrol untuk tujuan perbandingan dan penggunaan statistik untuk mengukur besarnya dampak.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini memberikan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.

Dalam rangka merespon dampak dari pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan di prioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Hal itu sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial.

Penerbitan Kartu Prakerja juga diharapkan dapat memberikan peluang bagi penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus mendapatkan pekerjaan.

Program Kartu Prakerja bertujuan:

1. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;

2. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
3. mengembangkan kewirausahaan.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian ini jelaslah menyatakan bahwa pengertian tenaga kerja sangat luas yakni mencakup semua penduduk dalam usia kerja baik yang sudah bekerja maupun yang mencari pekerjaan (menganggur). Usia kerja dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 minimal berumur 15 tahun (Pasal 69).

Tiga ciri utama permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia menurut Tciptoherijanto, 2000 dalam Maryanti, yaitu:

1. Laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi akibat derasnya arus pertumbuhan penduduk yang memasuki usia kerja,
2. Jumlah angkatan kerja besar, namun rata-rata memiliki Pendidikan rendah,
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, tapi rata-rata pendapatan pekerja rendah.

Sejak penyebaran COVID-19 di Indonesia hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga terkena dampak serius akibat pandemi COVID-19. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, akibat pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini menggunakan konsep Sutrisno (2007) dalam mengukur efektivitas program, yaitu:

1. Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program ini, dimulai dari pemahaman mendasar masyarakat tentang apa itu Kartu Prakerja, persyaratan penerima manfaat, siapa saja yang dapat menerima manfaat, besaran manfaat yang diterima, serta hal-hal teknis dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan.
2. Tepat sasaran, sasaran program Kartu Prakerja Ini adalah para pencari kerja dan buruh/pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya, tetapi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, program ini akan lebih di fokuskan kepada para pekerja ter PHK.

3. Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan melalui program pelatihan. Dimana tujuan dari Program Kartu Prakerja ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi angka pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Selain meningkatkan kompetensi, kartu prakerja juga memberikan insentif yang dapat membantu biaya hidup para penerima manfaatnya
5. Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana Program Kartu Prakerja memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi penerima manfaat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini digunakan agar memudahkan penulis mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami efektivitas program Kartu Prakerja bagi tenaga kerja di masa pandemi COVID-19 di kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar karena melihat tingkat pengangguran yang sangat tinggi di Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 15,92 persen, dengan situs Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang terletak di Jalan A. P. Pettarani No. 72 dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12.

Sumber data diperoleh dari:

1. Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai Fasilitator Program Kartu Prakerja di Kota Makassar sebanyak 1 orang
2. Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebanyak 1 orang
2. Staff Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 2 orang
3. Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja, baik terPHK maupun yang masih bekerja sebanyak 10 orang

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Program

Pemahaman Program bertujuan untuk menganalisis seberapa baik sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara program dalam memberikan pemahaman mengenai program Kartu Prakerja. Pelaksana sosialisasi pada tingkat provinsi/kota adalah Dinas Ketenagakerjaan. Sosialisasi ini dilakukan melalui media-media sosial milik Dinas Ketenagakerjaan maupun secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, akun yang digunakan masyarakat untuk membuat kartu pencari kerja (AK-1) juga merupakan akun yang digunakan untuk mendaftar kartu prakerja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Bapak R pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sekaligus fasilitator Program Kartu Prakerja di Kota Makassar, mengatakan bahwa::

“Program Kartu Prakerja ini merupakan program dari pemerintah untuk para pencari kerja hingga sampai para pekerja yang terdampak COVID-19. Para penerima itu nantinya akan ikut pelatihan dan dapat insentif serta sertifikat setelah pelatihannya selesai. Tapi awalnya program ini didesain bukan untuk pandemi, tetapi untuk teman-teman yang baru lulus kuliah atau sedang mencari pekerjaan.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2021)

Selain itu, Bapak R juga mengatakan:

“Kami aktif memberikan sosialisasi terkait program ini, melalui media sosial misalnya, hal ini supaya masyarakat paham mengenai tujuan program ini. Di setiap daerah juga ada yang namanya fasilitator, fasilitator inilah tugasnya untuk memahami masyarakat atau membantu kendala-kendala masyarakat saat proses pendaftaran sampai insentifnya cair.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2021).

Bapak I, salah satu pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada bidang yang sama, mengatakan:

“...Instagram kami itu aktif mengupdate tiap pembukaan gelombang, sebelumnya juga kami ada live itu di instagram, disitu kita bahas soal kartu prakerja, ada juga pamflet-pamflet yang kami tempel di kantor tapi kebanyakan sih yang bertanya melalui contact person khusus kartu prakerja.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2021)

Upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam memberikan pemahaman tentang program Kartu Prakerja kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan *contact person* sebagai sarana komunikasi yang dapat dihubungi oleh peserta atau calon peserta yang mengalami kendala dan melakukan sosialisasi melalui media sosial serta pamflet-pamflet yang tertempel di Kantor.

Development Policy and Management Review (DPMR).

Fasri, M. L. et al. Evaluasi Program Bantuan Ekonomi Pada Masa Pandemi.

Saudara U sebagai salah satu penerima program ini mengatakan:

“Menurut informasi yang saya baca, program ini adalah program bantuan untuk peningkatan keahlian yang dilakukan oleh Kemnaker untuk meningkatkan keahlian masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2021)

Lebih lanjut, Saudara U mengatakan:

“Tidak pernah ada sosialisasi secara langsung yang dilakukan pemerintah setahu saya, saya cuma pernah liat beberapa postingan di Instagram disnaker.” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2021)

Saudara S yang juga penerima program ini mengatakan:

“Program ini adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2021)

Lebih lanjut saudara S mengatakan:

“Jadi kita sebagai penerima itu ikut pelatihan, pelatihannya kita pilih dulu sesuai passion masing-masing. Setelah pelatihan selesai, tinggal menunggu sertifikat di dashboard akun dan jadwal pencairan insentif.” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2021)

Masyarakat penerima manfaat program ini, mereka cukup memahami program ini, meskipun tidak ada sosialisasi langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Sosialisasi langsung yang dimaksudkan pada konteks ini adalah sosialisasi langsung dimana Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar bertemu langsung dengan masyarakat. Sosialisasi hanya dilakukan melalui media sosial, dimana Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai fasilitator program dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, begitu pula masyarakat yang dapat menerima informasi dengan baik.

Tepat Sasaran

Tepat sasaran menunjukkan apa yang dikehendaki menjadi tercapai atau menjadi kenyataan atau dengan kata lain berarti sasaran yang ingin dicapai sesuai rencana. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah penerima Program Kartu Prakerja di Kota Makassar telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima.

Kriteria penerima program Kartu Prakerja adalah pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, calon penerima juga harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Hal itu sesuai dengan hasil

wawancara bersama Bapak R, fasilitator program Kartu Prakerja di Kota Makassar, yang mengatakan:

“Calon peserta program ini paling tidak sudah berusia 18 tahun dan tidak sedang bersekolah, teman-teman freshgraduate, dan yang terkena dampak COVID-19 juga bisa mendaftar.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2021)

Calon penerima harus membuat akun terlebih dahulu dan mendaftarkan NIK-nya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran pada calon penerima yang telah diverifikasi dan divalidasi melalui NIK.

Fasilitator program Kartu Prakerja di Kota Makassar, Bapak R juga mengatakan:

“Yang Namanya sistem pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pada gelombang-gelombang awal itu kan banyak dibahas beberapa orang seperti PNS atau pelajar/mahasiswa yang coba daftar dan lulus. Program ini juga kan dibuka seluas-luasnya jadi tidak menutup kemungkinan sistemnya miss.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2021)

Membenarkan hal tersebut, Bapak I, salah satu pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, mengatakan:

“Pasti ada yang seperti itu, saya rasa ini untung-untungan juga. Di lain kasus juga ada yang berkali-kali sudah coba daftar tetap tidak lulus, ada juga yang hanya coba sekali langsung lulus.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2021)

Hal tersebut secara tidak langsung turut dibenarkan oleh Saudara J, seorang mahasiswa yang coba-coba mendaftar pada gelombang 12 lalu dan lulus hingga insentifnya cair, Saudara J mengatakan:

“Saya waktu itu cuma iseng mendaftar, Cuma satu kali ternyata lulus. Jadi saya ikuti pelatihannya sampai insentif saya cair, alhamdulillah ada tambahan untuk uang jajan.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Juli 2021).

Jumlah penerima manfaat program Kartu Prakerja di Makassar sampai gelombang 10 adalah sebanyak 75.298 orang, yang merupakan kota dengan jumlah penerima terbanyak di Sulawesi Selatan.

Kartu Prakerja di Kota Makassar bisa dikatakan masih kurang tepat sasaran. Hal ini didasari oleh adanya penerima manfaat yang tidak sesuai dengan salah satu atau kriteria penerima manfaat program Kartu Prakerja. Penyebabnya cukup sulit untuk dijabarkan karena sistem seleksi yang digunakan pada program ini 100% *online*, data calon pendaftar hanya terintegrasi pada NIK yang didaftarkan.

Tepat Waktu

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu pelaksanaan suatu program dengan target waktu yang ditentukan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah

pencairan insentif program Kartu Prakerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, pencairan insentif dijadwalkan setelah peserta menyelesaikan pelatihan pertama dan sertifikat muncul di *dashboard* akun. Hal ini dibenarkan oleh salah satu penerima manfaat Program Kartu Prakerja, Saudara U yang mengatakan, bahwa:

“Satu minggu setelah pelatihan selesai, sertifikat muncul di dashboard akun saya lalu muncul jadwal pencairan, untuk saya tiap tanggal 10 tiap bulan.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2021).

Bapak R, fasilitator program Kartu Prakerja di Kota Makassar mengatakan:

“Pencairan insentif ini selalu jadi masalah. Empat kali penerimaan itu sudah ada jadwalnya, tiap tanggal sekian untuk gelombang sekian dan sebagainya. Ada yang tepat waktu ada juga yang tidak, seperti lebih cepat dari jadwal atau terlambat beberapa hari.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2021)

Hal yang sama turut dikatakan oleh salah satu penerima manfaat, saudara S yang mengatakan:

“Untuk pencairan insentif ini saya rasa tentatif ya, terkadang ada yang cepat, ada yang tepat waktu dan ada yang terlambat. Untuk akun saya sendiri biasanya maju satu hari dari jadwalnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2021).

Dengan demikian, para penerima program Kartu Prakerja dapat diketahui ketepatan waktu pencairan insentif ke rekening atau *e-wallet* peserta sudah cukup efektif. Hal ini dikarenakan pencairan insentif yang kebanyakan selalu cair lebih cepat dari jadwalnya, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa penerima yang harus lebih sabar untuk menunggu insentif mereka yang cair lebih lama.

Hasil (*outcome*)

Pencapaian tujuan dari program Kartu Prakerja dapat dilihat dari terwujudnya harapan dari adanya program ini. Berdasarkan UU No. 76 tahun 2020 Pasal 2, Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Namun, adanya pandemi COVID-19, Kartu Prakerja lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional yang sarannya para pekerja atau pelaku usaha mikro yang terdampak.

Bapak R, fasilitator program Kartu Prakerja di Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Tujuan utama program ini sebelum ada COVID adalah bagaimana para lulusan-lulusan baru memperoleh kursus atau pelatihan, sambil menunggu mereka mendapatkan pekerjaan, mereka bisa mengikuti program ini. Tapi karena tiba-tiba ada COVID, tujuannya semakin melebar, yang awalnya untuk para pencari kerja baru, tetapi jadi dibuka untuk umum.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2021)

Sebagaimana hasil wawancara Bapak R, selaku fasilitator program Kartu Prakerja di Kota Makassar, beliau mengatakan karena program ini sudah sampai gelombang 17, tentunya sudah dijalankan dengan baik dan tujuannya sudah sampai. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di tiap gelombang-gelombang sebelumnya dan pasti dilakukan pembaruan pada gelombang-gelombang sebelumnya. Seperti rencana pada gelombang selanjutnya yang akan lebih ramah kepada kelompok-kelompok disabilitas, beliau mengatakan:

“Sampai gelombang 17 kemarin ada kelompok disabilitas yang ingin ikut program ini tapi terkendala di beberapa hal, maka dari itu ada beberapa kelompok tertentu yang menyarankan ke pemerintah untuk khusus mengadakan satu gelombang khusus untuk kelompok rentan tersebut. Maka dari itu untuk gelombang 18 selanjutnya, Airlangga Hartarto akan membuat kartu prakerja lebih ramah kepada teman-teman yang disabilitas.”

Ibu S, seorang ibu rumah tangga penerima manfaat ini merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah program ini sangat membantu saya, apalagi saya seorang ibu rumah tangga. Beruntung sekali rasanya bisa lolos.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu AF, seorang pedagang yang juga penerima manfaat program ini, beliau mengatakan:

“Program ini sangat membantu saya yang seorang pedagang, saya ikuti kelas kewirausahaan. Bantuan uangnya juga saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2021)

Dengan demikian, tujuan dari program Kartu Prakerja telah tercapai, sesuai dengan tujuannya dalam Pasal 2 UU No. 76 Tahun 2020, yaitu meningkatkan kompetensi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan serta membantu masyarakat dengan insentif sebanyak 4 kali sebesar Rp. 600.000 dan survey setelah pelatihan selesai sebesar Rp. 50.000 persurvey.

Perubahan Nyata

Perubahan nyata menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perubahan kondisi masyarakat khususnya di Kota Makassar sebelum dan sesudah menerima manfaat dari program Kartu Prakerja. Perubahan nyata ini akan dilihat dari dua indikator, yaitu *short term outcome* (Hasil jangka pendek) dan *long term outcome* (Hasil Jangka Panjang).

Program Kartu Prakerja diharapkan mampu meningkatkan kompetensi serta keahlian masyarakat dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh mitra. Sayangnya, menurut Bapak I, salah satu pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, sertifikat yang didapatkan pada pelatihan yang disediakan oleh mitra dinilai masih kurang, beliau mengatakan:

Development Policy and Management Review (DPMR).

Fasri, M. L. et al. Evaluasi Program Bantuan Ekonomi Pada Masa Pandemi.

“Sertifikat yang didapatkan dari pelatihan ini kan ditanda tangani oleh mitra, seperti Tokopedia, ruang guru, dan penyedia pelatihan lainnya. Saya rasa itu masih kurang untuk menunjang penggunaan sertifikat ini saat melamar pekerjaan.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2021)

Hal yang sama turut disampaikan oleh salah satu penerima manfaat yang menyebutkan sertifikat yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan masih kurang nilai jualnya, Saudara U, mengatakan:

“Sertifikat yang didapat itu berbentuk digital. Menurut saya sertifikat itu tidak bisa digunakan dalam mencari pekerjaan atau kurang bisa digunakan. Tapi secara keilmuan dan pengembangan diri dari program ini itu ada, tapi dari sertifikatnya saya rasa kurang nilai jualnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2021)

Selain itu, besaran insentif yang diterima pun dinilai masih kurang, Saudara U juga mengatakan:

“Sebenarnya untuk insentif sebesar itu dengan tujuan membuka usaha maupun mengembangkan usaha itu saya rasa tidak cukup. Kalau saya paling dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli paket data yang habis karena pelatihan itu juga. Tapi kalau dari segi pelatihan, untuk saya sangat bermanfaat, saya sekarang sudah bisa design grafis.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2021).

Dengan demikian bahwa dapat dilihat perubahan jangka pendek yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat adalah ilmunya bertambah melalui video pelatihan serta mendapatkan insentif setelah menyelesaikan pelatihan.

Selain itu, Saudara U, penerima manfaat sekaligus pegawai kontrak di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan tidak ada hak khusus atau kemudahan lebih untuk para alumni Kartu Prakerja untuk mendapatkan pekerjaan, Saudara U mengatakan:

“Saya rasa tidak ada privilege khusus untuk kami alumni program ini. Untuk sektor formal tidak ada, tapi untuk sektor nonformal seperti membuka usaha itu bisa. Karena pelatihannya ada tata rias salah satunya, pelatihan itu bisa menunjang untuk membuka usaha.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2021).

Pelatihan yang dilakukan oleh peserta juga rentan dimanipulasi, karena pelatihan yang dilakukan hanya melalui video pembelajaran yang hanya satu arah, peserta dapat mengikuti pelatihan tanpa benar-benar mengikutinya. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu AF seorang pedagang yang mengikuti pelatihannya ditengah aktivitas sehari-hari, beliau mengatakan:

“karena durasi video pembelajarannya lumayan panjang, jadi saya menyelesaikannya dengan menyicil. Kadang saya lakukan saat jualan sepi.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak R, fasilitator program Kartu Prakerja di Kota Makassar mengakui bahwa tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk para lulusan Kartu Prakerja, beliau mengatakan:

“Tidak ada evaluasi yang kami lakukan untuk lulusan program ini di Kota Makassar. Data peserta yang lulus juga tidak by name by address jadi orang-orangnya kita tidak tau. Juga tidak ada keharusan bagi yang lulus untuk melapor ke Disnaker kota atau daerah setempat. (Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2021).

Dengan begitu kita dapat melihat tidak ada perubahan nyata jangka panjang yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat kartu prakerja. Para penerima manfaat hanya merasakan manfaat dari video pelatihan serta insentif yang diberikan, belum ada perubahan jangka panjang yang dapat dirasakan peserta.

Perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat program kartu prakerja di Kota Makassar masih kurang efektif. Penerima manfaat hanya merasakan perubahan setelah mengikuti pelatihan, seperti ilmunya bertambah dan skillnya semakin terasah, tidak ada jaminan untuk para alumni program ini untuk mendapatkan pekerjaan atau dapat membuka usaha setelahnya, tetapi ilmu yang didapatkan dari pelatihan yang diambil oleh penerima manfaat dapat berguna untuk mereka. Insentif yang didapatkan penerima manfaat pun hanya dapat membantu menunjang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk para alumni Kartu Prakerja, membuat perubahan lebih nyata yang dirasakan oleh penerima manfaat di Kota Makassar semakin tidak terlihat.

KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan program Kartu Prakerja di Kota Makassar sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari analisis teori yang digunakan, yaitu: pemahaman masyarakat mengenai program Kartu Prakerja dapat dikatakan baik dikarenakan sosialisasi yang sudah ada dari pemerintah pusat dan juga pemerintah kota sebagai fasilitator dapat memberikan pemahaman melalui sosialisasi-sosialisasi di media sosial. Masyarakat dapat memahami dengan baik program yang mereka ikuti, juga mereka sudah merasakan manfaat dengan adanya program ini yang dapat membantu mereka meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan juga membantu menunjang kebutuhan sehari-hari melalui insentif yang mereka dapatkan. Meskipun dengan mengikuti program ini masyarakat belum sepenuhnya merasakan perubahan nyata, seperti mendapatkan pekerjaan atau benar-benar terbantu dalam hal ekonomi.

Disisi lain ada hal yang masih perlu dibenahi dengan adanya program ini, seperti ketepatan sasaran penerima program ini yang dikatakan masih kurang, juga tidak adanya efek jangka panjang yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat setelah selesai mengikuti program ini dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah

Development Policy and Management Review (DPMR).

Fasri, M. L. et al. Evaluasi Program Bantuan Ekonomi Pada Masa Pandemi.

kota untuk mendata penerima-penerima yang ada di Kota Makassar. Juga sertifikat yang diterima oleh penerima manfaat setelah menyelesaikan pelatihan, yang dinilai kurang untuk digunakan dalam mencari pekerjaan.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 (No.86/11/Th. XXIII, 05 November 2020). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Agustus 2020 (No.61/11/73/Th. XIV, 5 November 2020). Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.
- Djojohadikusumo, S. (1985). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Effendy, O. U. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gibson, Ivancevich, & Donnelly. (1994). Organisasi; Perilaku, Struktur, dan Proses. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020, 8 April). Menaker Ida Fauziyah Minta Pengusaha Jadikan PHK Sebagai Langkah Terakhir. Biro Humas Kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2021). Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020. Jakarta: Menko Perekonomian.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). KPK Minta Pemerintah Tunda Program Kartu Prakerja. Jakarta: KPK.
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1700-kpk-minta-pemerintah-tunda-program-kartu-prakerja>. (1 Maret 2020)
- Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manullang, M., & Manullang, M. A. (2004). Manajemen Personalia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Maryanti, S., Wiyati, R., & Thamrin, M. (t.thn.). Deskripsi Perencanaan Ketenagakerjaan. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musanef. (1991). Manajemen Kepegawaian Indonesia. Jakarta: CV Haji Masagung.

- Purwanto, A. (2020, 3 Juli). Merunut Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/merunut-kebijakan-penanganan-wabah-covid-19-di-indonesia> diakses pada 1 Maret 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis, Tata Cara Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dengan Cara Luar Jaringan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- Rakhmat, F. (2018). Efektivitas Program Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kepulauan Riau. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Satries, W. I. (2011). Efektivitas Program Pemberdayaan Pemuda Pada Organisasi Kepemudaan Al-Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi. Salemba: Universitas Indonesia.
- Siagian, S. P. (2006). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Siahaan, S. M. (1999). Komunikasi Pemahaman dan Penerapan. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sembiring, L. J. (2020, 11 April). Gelombang I, Peserta Kartu Prakerja yang Diterima 200 Ribu. CNBC.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200416184229-37-152505/gelombang-i-peserta-kartu-prakerja-yang-diterima-200-ribu> diakses pada 1 maret 2021.
- SMERU Research Institute. (2020). Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19: Asesmen Cepat dari Sudut Pandang Peserta Program. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta Pusat: Erlangga.
- Suratman. (2019). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno, E. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, E. (2007). Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana.
- Thalia, W. (2020). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Development Policy and Management Review (DPMR).

Fasri, M. L. et al. Evaluasi Program Bantuan Ekonomi Pada Masa Pandemi.

- Thomas, V. F. (2020, 25 November). Survey BPS Menyingkap Soal Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran. *tirto.id*. <https://tirto.id/survei-bps-menyingskap-soal-kartu-prakerja-tak-tepat-sasaran-f7mj>. 2 Maret 2021
- Tim Prima Pena. (na). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitamedia Press.
- Tindaon, O. (2010). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Jawa Tengah (Pendekatan Demometrik). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tjokroamidjojo, B. (1974). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Westra, P., Sutarto, & Syamsi, I. (1989). Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wibowo. (2010). Budaya Organisasi: Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yuniarsih, T., & Suwatno. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan